

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Olvi Verdian Abdillah¹⁾, Hefrizal Handra²⁾ dan Adrimas³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

email: ¹olvi.va93@gmail.com

²hefrizalhandra@gmail.com

³adrimas@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect of the Local Own-Source Revenue (OSR) in West Sumatra. As for the data used is the data panel, which is the combination of time series data for 2010-2017 and cross-section data in 19 regencies/city in West Sumatra. Based on the the regression test using the Fixed Effect Model (FEM) obtained results that all of the three independent variables are significantly affect to OSR. On the other hand, based on the partial test, obtained that only dummy variables which representing the policy of transfer authority to managing of rural and urban land and buildings taxes (PBB-P2) from the central government to the local government does not significantly affect the OSR, while the two other variables per-capita GDRP and the number of electric customers partially significantly affect PAD.

Keywords: *fixed effect model; growth; local own-source revenue (OSR); transfer PBB-P2.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat. Adapun data yang digunakan merupakan data panel, yaitu kombinasi data time series tahun 2010-2017 dan data cross-section pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama ketiga variabel bebas signifikan mempengaruhi PAD. Sementara pada uji parsial diperoleh hasil bahwa hanya variabel dummy yang mewakili kebijakan transfer kewenangan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pusat ke daerah tidak signifikan mempengaruhi PAD, sementara dua variabel bebas lainnya yaitu PDRB Perkapita dan jumlah pelanggan listrik secara parsial signifikan mempengaruhi PAD.

Kata kunci: *fixed effect model; PAD; pertumbuhan ekonomi; transfer PBB-P2*

Detail Artikel :

Diterima : 29 Agustus 2019

Disetujui : 28 Oktober 2019

[DOI : 10.22216/jbe.v4i3.4502](https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4502)

PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia telah merubah paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi pembangunan yang bertumpu pada roda pergerakan yang dimulai dari bawah (desentralisasi), dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Sebagai konsekuensi berlakunya kebijakan ini maka setiap daerah bebas untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan di wilayahnya masing-masing yang tetap memegang kaidah tanggungjawab serta sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Pemberlakuan otonomi daerah membebaskan setidaknya dua aspek kewajiban bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut, yaitu aspek pendapatan dan juga aspek manajemen pengeluaran daerah (Mardiasmo, 2004). Dari sisi pendapatan, setiap daerah dituntut agar menjadi lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Termasuk di dalamnya terdapat tuntutan bagi daerah untuk mampu mengurus pembiayaan daerahnya sendiri dengan kekuatan utama yang bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara di sisi manajemen pengeluaran daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah sendiri kini menduduki peran yang semakin penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih otonomi daerah di Indonesia telah berjalan hampir dua dekade. Selama masa tersebut, tak sedikit daerah yang kemudian menjadi lebih makmur dibandingkan era sebelumnya, namun tak pula dapat dipungkiri bahwa masih banyak daerah-daerah yang sulit untuk beradaptasi dan belum berhasil mencapai tujuan pembangunan di era otonomi ini. Hal tersebut tak terlepas dari kurangnya kreatifitas daerah dalam menggali ataupun mendorong potensi-potensi keuangan di daerahnya.

Bercermin pada kondisi keuangan kabupaten/kota di Indonesia secara umum dan terkhusus pada Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 sebagian besar kabupaten/kota masih dikategorikan sebagai sebagai daerah yang belum baik dari sisi pengelolaan keuangan daerahnya. Misalnya saja dari sisi kemandirian keuangan daerah, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat rata-rata hanya memiliki tingkat kemandirian daerah sebesar 8,55 persen yang terkategori sebagai daerah yang memiliki pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat. Rendahnya angka kemandirian daerah tersebut merupakan gambaran bahwa masih dominannya peran pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2015 dimana tingkat rata-rata kemandirian daerah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya berada pada angka 8,57 persen. Hal ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Kuncoro (1995) dimana pada saat itu ia mengkhawatirkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat tentunya tak unjung berlepas tangan. Berbagai kebijakan pun diupayakan untuk memperkuat kondisi keuangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penetapan Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian berdampak pada pemindahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula dikelola oleh pemerintah pusat kini dilimpahkan sepenuhnya ke daerah. Kebijakan tersebut diberlakukan mulai tahun 2011 pada sebagian kabupaten/kota yang telah siap dan secara bertahap akan dikembalikan sepenuhnya pada kabupaten/kota secara efektif merata pada tahun 2014.

Dengan pemindahan kewenangan pengelolaan salah satu basis pajak tersebut, pemerintah pusat berharap bahwa pemerintah daerah akan mampu menjadi lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Namun disisi lain, penyerahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 ini juga akan menghadirkan tantangan baru bagi daerah, seperti rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak, hadirnya SPPT ganda karena data yang dimiliki tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang, hingga sarana prasarana yang mungkin belum sesuai kebutuhan, hingga pada akhirnya kebijakan ini dapat pula berdampak buruk bagi realisasi PAD dan keuangan daerah.

Pramandari (2014) juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah atau peningkatan PDRB merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat capaian keberhasilan pembangunan daerah. Dengan kata lain PDRB dapat dikatakan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. PDRB suatu daerah yang semakin tinggi akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada gilirannya hal tersebut akan mempengaruhi realisasi penerimaan PAD yang semakin baik pula. Hal ini sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman yang diungkapkan dalam Mangkoesobroto (1993) bahwa Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun saat itu tarif pajak tidak berubah. Desmawati (2015) juga memberikan pernyataan yang senada, menurutnya daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan kenaikan PAD. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu untuk memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dibandingkan sekedar mengeluarkan produk perundang-undangan yang berhubungan dengan pajak maupun retribusi.

Berkaca pada krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan dunia pada tahun 2008 yang lalu, Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sehat dan berkelanjutan. Dua hal tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi inklusif. Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Adapun cara meningkatkan ekonomi inklusif yang dimaksud adalah dengan pemerataan infrastruktur, menumbuhkan ekonomi kreatif, serta mengembangkan UMKM yang disokong oleh perbankan terutama Bank Pembangunan Daerah.

Kondisi perekonomian di Provinsi Sumatera Barat sendiri terus mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut terlihat dari kontribusi total PDRB kabupaten/kota yang relatif besar terhadap PDB nasional jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya. Tercatat pada tahun 2017 Sumatera Barat memiliki nilai PDRB sebesar Miliar Rupiah atau 1,56 persen dari total PDB nasional. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan beberapa daerah lain seperti Provinsi Jambi yang hanya memiliki PDRB 1,37 persen dari total PDB nasional atau Provinsi Bali 1,45 persen. Lebih lanjut, melihat pada angka pertumbuhannya, perekonomian Sumatera Barat juga bisa dikatakan relatif baik. Dari tahun 2010 hingga 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat selalu tumbuh pada angka rata-rata 5,81 persen yang mana pada setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Dengan relatif baiknya kondisi perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, maka dan berdasar kepada beberapa pendapat tinjauan yang dikemukakan sebelumnya, maka terlihat sebuah *gap* dimana kondisi keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat justru belum cukup baik.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan diatas, maka perlu dilihat bagaimana pengaruh kondisi perekonomian dan kebijakan transfer pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pusat ke daerah terhadap tingkat penerimaan PAD. Selain itu PAD yang salah satunya bersumber dari basis pajak diduga juga dipengaruhi oleh

jumlah pelanggan listrik di masing-masing daerah. Dimana jumlah pelanggan listrik PLN sangat erat hubungannya dengan pajak penerangan jalan. Oleh sebab itu maka perlu untuk analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tersebut.

METODE PENELITIAN

Uji Regresi Data Panel

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dengan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi *time series* tahun 2010-2017 dan *cross-section* 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Adapun variabel bebas yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita), jumlah pelanggan listrik dan *dummy* transfer kewenangan pengelolaan PBB-P2.

Data diperoleh dari sumber-sumber berupa buku cetak maupun online dari seri Sumatera Barat dalam angka dan kabupaten/kota dalam angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik provinsi. Selain itu juga digunakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, serta jumlah pelanggan listrik yang diperoleh dari PLN regional Sumatera Barat.

Model Analisis

Model Analisis regresi data panel secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut (Gujarati: 2009):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + e_{it} \dots (1)$$

Seperti yang diketahui, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sehingga dependen variabel yang digunakan dalam uji regresi ini adalah PAD, sementara variabel bebas yang diduga mempengaruhi nilai PAD tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dalam penelitian ini digunakan PDRB Perkapita (PDRBk), jumlah Pelanggan listrik (JPL) serta *Dummy* transfer PBB-P2 (DU).

Berdasarkan pada hal tersebut dan mengacu pada Gujarati (2009) serta mengadopsi model penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2002), Supriyono (2009) serta model penelitian Mayza, Masbar dan Nasir (2015) yang menggunakan variabel penelitian yang serupa yaitu PAD, PDRBk, PDK, *Dummy*, maka diturunkan lah model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBk_{it} + \beta_2 JPL_{it} + \beta_3 DU_{it} + e_{it} \dots (2)$$

Meski demikian, dikarenakan perbedaan unit satuan antar variabel bebas yang ada, oleh sebab itu maka model persamaan tersebut diturunkan menjadi model dengan logaritma natural, sebagai berikut :

$$\ln PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRBk_{it} + \beta_2 \ln JPL_{it} + \beta_3 DU_{it} + e_{it} \dots (3)$$

Dimana :

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- PDRBk = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
- JPL = Jumlah pelanggan listrik
- DU = Variabel *dummy*;
Tahun sebelum transfer PBB-P2 = 0
Tahun saat dan setelah transfer PBB-P2 = 1

β_0	=	<i>Intercept</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
i	=	Unit observasi
t	=	Unit waktu, dan
e	=	Error term

Terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam analisis data panel :

Pooled Least Square (*Common Effect Model*)

Model *common effect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut (Widarjono, 2009). Model ini merupakan model paling sederhana diantara ketiga model yang ada. Terdapat kelemahan dalam model ini dimana metode *CEM* ini mengasumsikan bahwa nilai intersep antar individual dianggap sama, dimana hal ini merupakan asumsi yang sangat membatasi (*restricted*) (Gujarati, 2009).

Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Pengertian *fixed effect model* adalah model dengan intersep berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2009). Model ini mengasumsikan bahwa intersep berbeda pada setiap subjek, sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy*. Model ini sering disebut dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

Model Efek Random (*Random Effect Model*)

Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) *random effect model* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*.

Dari ketiga teknik yang mungkin untuk estimasi dalam data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* akan dipilih teknik yang terbaik yang akan digunakan dalam penelitian. Ketiga teknik ini akan dipilih dengan menggunakan uji statistik F (*Chow Effect*) dan uji Hausman.

Uji statistik F (*Chow Test*)

Dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). H_0 dari Uji Chow adalah *Common effect* dan H_1 adalah *fixed effect*. Jika nilai probabilitas untuk *cross section* $F > 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya model yang dipilih adalah CEM, tetapi jika prob *cross section* $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya model yang terpilih adalah FEM.

Uji Hausman

Jika berdasarkan Uji Chow terpilih model CE, maka Uji Hausman tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika yang terpilih adalah FEM selanjutnya kita memerlukan Uji Hausman untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). H_0 dari Uji Hausman yaitu REM dan H_1 adalah FEM. Jika nilai probabilitas *cross section random* $> 0,05$ maka H_0 diterima artinya model yang digunakan adalah REM, tetapi jika probabilitas *cross section random* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang akan digunakan adalah model FEM.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Model Estimasi
Common Effect vs Fixed Effect

Tabel 1
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model *Pooled Least Squares*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.224015	0.694510	6.082011	0.0000
LnPDRBk?	0.533502	0.132853	4.015731	0.0001
LnJPL?	0.419447	0.047115	8.902571	0.0000
DUMMY_?	0.573746	0.086850	6.606156	0.0000
R-squared	0.624436	Mean dependent var	10.81590	
Adjusted R-squared	0.616823	S.D. dependent var	0.701303	
S.E. of regression	0.434116	Akaike info criterion	1.194953	
Sum squared resid	27.89157	Schwarz criterion	1.274528	
Log likelihood	-86.81640	Hannan-Quinn criter.	1.227279	
F-statistic	82.02452	Durbin-Watson stat	0.304191	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa ketiga variabel yaitu PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik dan transfer kewenangan pengelolaan PBB-P2 (*dummy*) signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah pada tingkat $\alpha = 5$ persen. Meski demikian, jika meninjau pada nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.616823 yang cukup rendah dan nilai Durbin-Watson stat 0.304191 yang mana berada pada daerah $dw < dL$, maka dalam pengujian ini terdapat autokorelasi.

Oleh sebab itu perlu dilakukan pengujian dengan *Fixed Effect Model* seperti yang tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.489464	2.454269	-0.606887	0.5450
LnPDRBk?	1.674160	0.240449	6.962632	0.0000
LnJPL?	0.612635	0.283051	2.164400	0.0323
DUMMY_?	0.093964	0.064817	1.449689	0.1496
R-squared	0.933349	Mean dependent var	10.81590	
Adjusted R-squared	0.922582	S.D. dependent var	0.701303	
S.E. of regression	0.195131	Akaike info criterion	-0.297160	
Sum squared resid	4.949912	Schwarz criterion	0.140507	
Log likelihood	44.58416	Hannan-Quinn criter.	-0.119365	
F-statistic	86.68802	Durbin-Watson stat	0.962456	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Sedikit berbeda dengan hasil pengujian sebelumnya menggunakan *common effect model* (CEM), pengujian dengan FEM memberikan hasil yang lebih memuaskan jika meninjau

pada nilai adjusted R-squared yang mana nilainya adalah 0,922582. Meski demikian pada pengujian ini terlihat bahwa variabel *dummy* tidak signifikan mempengaruhi PAD pada tingkat $\alpha = 5$ persen dan $\alpha = 10$ persen dimana nilai Prob. nya adalah 0.1496.

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui model yang paling tepat digunakan untuk mengolah data dengan cara membandingkan *Common Effect* dengan *Fixed effect*. H_0 dari Uji Chow adalah *Common effect* dan H_1 adalah *fixed effect*. Adapun hipotesis dalam uji Chow ini dapat dituliskan sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect* atau *Pooled Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 3
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.473277	(18,130)	0.0000
Cross-section Chi-square	262.801131	18	0.0000

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka dapat dilihat nilai statistik-F adalah sebesar 33.473277 dengan Probabilitas 0.000 atau lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model yang lebih tepat untuk digunakan diantara dua model diatas *fixed effect model*. Meski demikian, perlu dilakukan uji lebih lanjut dengan menggunakan *random effect model* yang dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan model mana yang lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini, apakah *fixed effect* atau *random effect model*. Adapun hasil pengujian dengan menggunakan model *random effect* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.091619	0.964399	0.095001	0.9244
LnPDRBk?	1.436322	0.145349	9.881856	0.0000
LnJPL?	0.535625	0.091470	5.855723	0.0000
DUMMY_?	0.197836	0.059928	3.301223	0.0012

Weighted Statistics

R-squared	0.835620	Mean dependent var	2.275524
Adjusted R-squared	0.832288	S.D. dependent var	0.511601
S.E. of regression	0.209514	Sum squared resid	6.496650
F-statistic	250.7836	Durbin-Watson stat	0.745500
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Melihat pada hasil uji dengan *Random Effect Model* pada tabel 4, terlihat bahwa nilai adjusted R^2 adalah sebesar 0.832288. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan Adjusted R^2 pada *Fixed Effect Model* yaitu sebesar 0.922582. Selain itu terdapat perbedaan pada angka prob. dalam *Random Effect Model* Ini, dimana terlihat bahwa seluruh variabel bebas

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya kita perlu melihat hasil Uji Hausman untuk menentukan model mana yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Fixed Effect vs Random Effect Model

Uji Hausman

Uji Hausman diperlukan dikarenakan hasil sebelumnya menunjukkan bahwa *fixed effect* adalah metode yang terbaik untuk analisis data panel yang kita miliki. Adapun hipotesis dalam uji Chow ini dapat dituliskan sebagai berikut :

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.622131	3	0.0000

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 5, terlihat bahwa nilai *Chi-Sq. Statistic* adalah sebesar 25.622131 dengan angka probabilitas *cross-section random* adalah 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya metode terbaik untuk mengestimasi data panel 19 kabupaten kota yang kita miliki adalah dengan menggunakan metode *fixed effect*.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Data panel yang disertakan dalam pengujian merupakan *balanced*. Pengujian dilakukan dengan model logaritma natural (LN) untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul akibat nilai satuan nilai data yang tidak setara. Dari hasil estimasi yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.489464	2.454269	-0.606887	0.5450
LnPDRBk?	1.674160	0.240449	6.962632	0.0000
LnJPL?	0.612635	0.283051	2.164400	0.0323
DUMMY_?	0.093964	0.064817	1.449689	0.1496
R-squared	0.933349	F-statistic		86.68802
Adjusted R-squared	0.922582	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Dilihat dari hasil uji dengan *fixed effect model*, regresi dapat diambil beberapa hal yaitu:

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau yang biasa di tulis dengan R² merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar model yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara statistik. Nilai koefisien determinasi sendiri berada pada angka 0 sampai dengan 1. Semakin besar (semakin mendekati 1) nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil regresi pengaruh PDRB perkapita, jumlah pelanggan listrik dan *dummy* transfer kewenangan PBB-P2 dari pusat ke daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2017 diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0,933349. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang terdapat dalam model tersebut mampu menjelaskan variabel dependen (PAD) sebesar 93,34 persen. Sisanya lebih kurang 6,66 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam model ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau yang biasa disebut dengan uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *F-statistic* (F-hitung) yang kemudian dibandingkan dengan F-tabel secara manual atau dengan melihat nilai *Prob (F-statistic)*.

Dari hasil regresi diatas diperoleh bahwa nilai F-hitung sebesar 86.68802 serta nilai *Prob (F-statistic)* dari uji di atas adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa keseluruhan variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRBk), jumlah pelanggan listrik dan transfer kewenangan pengelolaan PBB-P2 secara bersama-sama signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Berbeda dengan uji F yang melihat pengaruh independen variabel secara bersama-sama terhadap dependen variabel, uji statistik t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. Uji-t dapat dilakukan dengan dua cara pula, yaitu pertama membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel, atau kedua dengan melihat nilai probabilitas t-statistik. Apabila nilai probabilitas kecil dari pada $\alpha = 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tersebut signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Variabel PDRB perkapita memiliki koefisien regresi positif 1.674160 dengan nilai probabilitast-statistik sebesar 0.00 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang artinya PDRB perkapita secara parsial signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang mana apabila terjadi kenaikan PDRB perkapita sebesar 1 persen makan akan meningkatkan PAD sebesar 1,674 persen dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.

Variabel Jumlah Pelanggan listrik rumah tangga (JPL) memiliki koefisien regresi positif 0.612635 dan signifikan mempengaruhi PAD pada $\alpha = 0,05$. Hal tersebut terlihat dari nilai prob. statistik t sebesar 0.0323. Artinya apabila terjadi kenaikan jumlah pelanggan listrik sebesar 1 persen makan akan meningkatkan PAD sebesar 0,6126 persen dengan asumsi variabel lain nilainya konstan.

Variabel *dummy* transfer kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah ternyata tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas statistik t sebesar 0.1496 yang lebih besar dari 0,05.

Mengingat model yang digunakan dalam pengujian merupakan *fixed effect*, maka perlu dilihat juga *cross-section effect* untuk tiap daerah. Nilai ini menunjukkan perbedaan intesep untuk tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 7
Intersep untuk Masing-Masing Daerah

Kota/Kabupaten	Ci	C + Ci	Kota/Kabupaten	Ci	C + Ci
Kep.Mentawai	0.82406	-0.6654	Dharmasraya	-0.25631	-1.7458

Pesisir selatan	0.59122	-0.8982	Pasaman Barat	0.16495	-1.3245
Kab. Solok	0.00494	-1.4845	Padang	0.06977	-1.4197
Sijunjung	0.36636	-1.1231	Kota Solok	-0.73278	-2.2222
Tanah Datar	0.58258	-0.9069	Sawahlunto	0.18473	-1.3047
Padang Pariaman	-0.29353	-1.7830	Padang Panjang	-0.52287	-2.0123
Agam	-0.08599	-1.5755	Bukittinggi	-0.52932	-2.0188
Limapuluh Kota	-0.01625	-1.5057	Payakumbuh	0.02600	-1.4635
Pasaman	0.73127	-0.7582	Pariaman	-1.21279	-2.7022
Solok Selatan	0.10396	-1.3855			

Sumber: data Sekunder yang diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa daerah yang memiliki intersep paling rendah adalah Kota Pariaman dengan nilai -2.7022, sementara daerah yang memiliki intersep tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai intersep -0,6654. Meskipun terdapat perbedaan intersep antar daerah, namun terlihat jelas bahwa pada keseluruhan kabupaten dan kota nilai intersep untuk model penelitian ini adalah negatif.

Kemudian merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, variabel PDRB perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya PAD akan meningkat secara nyata apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat baik di Kabupaten atau Kota yang ada di Sumatera Barat. Hasil ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Peacock dan Wiseman yang menyatakan Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun saat itu tarif pajak tidak berubah.

Dilihat dari struktur jumlah pelanggan listrik rumah tangga, terlihat jelas bahwa Kota Padang memiliki jumlah pelanggan listrik kontras dibandingkan dengan daerah lain, jumlahnya hampir dua sampai empat kali lipat nya. Hal tersebut secara kasat mata berpengaruh terhadap besarnya pajak penerangan jalan yang diterima oleh Kota Padang itu sendiri, yang mana jumlahnya mencapai 36 persen dari total pajak daerah. Meskipun daerah lain memiliki jumlah pelanggan listrik yang jauh dibandingkan dengan Kota Padang, ternyata jumlah tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Meskipun pemerintah pusat telah berusaha memperkuat kondisi keuangan daerah dengan penambahan basis pajak daerah, namun nampaknya kebijakan tersebut belum terlaksana secara optimal, sehingga apa yang diharapkan dari penetapan kebijakan tersebut belum berhasil diwujudkan. Oleh sebab itu perlu upaya yang konsisten dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak PBB-P2 ini dalam rangka meningkatkan PAD melalui peningkatan kualitas SDM pemerintah, maupun kesiapan data yang akurat untuk mencapai pemungutan PBB-P2 yang efektif dan optimal. Penetapan tarif yang tepat juga penting untuk diperhatikan sehingga tidak menjadi beban tambahan bagi kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil pengujian, variabel PDRB perkapita dan Jumlah Pelanggan Listrik (JPL) pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$). Sementara disisi lain transfer kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$).

Meskipun demikian, secara bersama-sama, ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap PAD pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$). Model penelitian ini

ditemukan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,34 persen, sisanya 6,66 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan dalam upaya peningkatan PAD, PDRB perkapita menjadi faktor utama yang harus ditingkatkan. Adapun upaya peningkatan PDRB perkapita dapat dilakukan adalah melalui investasi modal maupun investasi SDM sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mardiasmo sebelumnya. Disisi lain, pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya kepada daerah merupakan sebuah peluang besar yang sebaiknya dioptimalkan dalam upaya menggenjot kekuatan keuangan daerah. Pemerintah dapat mengusahakan perbaikan sinkronisasi data dan disertai dengan peningkatan kualitas SDM agar pemungutan PBB-P2 menjadi lebih optimal. Disaat yang bersamaan penting untuk terus memberikan kesadaran dan bukti kepada masyarakat bahwa PBB-P2 yang dibayarkan oleh masyarakat memang dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada BPS, Kementerian Keuangan dan PLN yang telah memberikan akses secara luas terkait data penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas yang telah memberi dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, W. S. (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia : Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi* (1st ed.). Semarang: Aneka Ilmu.
- Arsyad, L. (2005). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astuti, W., & Maryono, M. (2016). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. *Students' Journal of Accounting and Banking*, 5(1). Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe8/article/view/4042>
- Desmawati, A., Zamzami, Z., & Zulgani, Z. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49–58. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/2638>
- Gujarati, D. N. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan. *Prisma*, 24(4), 3–17.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1), 9–16.

- Pramandari, P. Y. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen (JUIMA)*, 4(2), 118–126. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/100900-ID-analisis-pertumbuhan-ekonomi-provinsi-ba.pdf>
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 74–86.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- SKPD, L. (2015). Percepatan Pencapaian PBB-P2. Retrieved July 6, 2018, from www.tanahdatar.go.id/berita/1388/percepatan-pencapaian-pbb-p2.html
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Supriyono. (2009). Peran Dana Perimbangan, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah di Wilayah Solo Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 38–62. Retrieved from <https://doi.org/10.20961/jiep.v9i1.2100>
- Sutrisno. (2002). *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)* (Universitas Diponegoro). Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/9445/>
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (3rd ed.). Yogyakarta: Ekonisia.
- Widjaja, H. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.